

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN OBYEK WISATA

A. Kepariwisataan

1. Pengertian Pariwisata

Pengertian Pariwisata Kata wisata (tour) secara harfiah dalam kamus berarti perjalanan dimana si pelaku kembali ke tempat awalnya, perjalanan sirkuler yang dilakukan untuk tujuan bisnis, bersenang-senang, atau pendidikan, dengan mengunjungi berbagai tempat dan biasanya menggunakan jadwal perjalanan yang terencana.¹ Menurut Murphy definisi pariwisata mencakup wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri, dan lainnya, yang merupakan akibat dari perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata.²

Definisi pariwisata adalah fenomena pergerakan manusia, barang dan jasa yang sangat kompleks. Ia terkait dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan individu, kebutuhan layanan, penyediaan kebutuhan layanan dan sebagainya.³ Pariwisata merupakan perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Aktivitas dilakukan selama mereka tinggal di tempat yang dituju dan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁴

Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, tarif hidup, dan

¹ Pitana, I Gededan Putu G. Gayatri, 2005, *Sosiologi Pariwisata*, Jakarta: paramita Pradnya

² *Ibid*

³ Damanik, Januantin dan Weber, Helmut. 2006. *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: PUSPAR UGM dan Andi. Hlm. 1

⁴ Marpaung, happy, *pengetahuan kepariwisataan*, Bandung, Alfabeta, 2000.

dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan. Pariwisata sebagai kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mencari kepuasan, mencari sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan lain-lain⁵.

Pariwisata harus memenuhi empat kriteria di bawah ini, yaitu⁶:

1. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perjalanan dilakukan di luar tempat kediaman di mana orang itu biasanya tinggal
2. Tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang, tanpa mencari nafkah di negara, kota atau DTW yang dikunjungi.
3. Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara asalnya, di mana dia bisa tinggal atau berdiam, dan bukan diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan; dan
4. Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih.

Dalam pengertian kepariwisataan terdapat empat faktor yang harus ada dalam batasan suatu definisi pariwisata. Faktor-faktor tersebut adalah perjalanan itu dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, perjalanan itu harus dikaitkan dengan orang-orang yang melakukan perjalanan wisata semata-mata sebagai pengunjung tempat wisata tersebut.

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan menjelaskan pariwisata sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata yang menjadi sasaran wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang

⁵ Badrudin, Budi. 2000. *Pariwisata Indonesia Menuju World Class Tourism. Jurnal Akutansi dan Manajemen*

⁶ Oka yoeti, 2008. *Perencanaan dan pengembangan Pariwisata*, Jakarta : PT. Paramita. hlm 8

tersebut. Sedangkan objek wisata sendiri mengandung pengertian objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa⁷, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna, objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan perjalanan ke daerah tujuan wisata untuk sementara waktu dengan tujuan untuk keluar dari rutinitas sehari-hari. Pariwisata berhubungan dengan manusia, barang dan jasa, dan terkait dengan organisasi baik swasta maupun pemerintah. Pariwisata yang menjadi daya tarik wisata berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna, objek dan hasil karya manusia.

2. Bentuk-Bentuk Pariwisata

Bentuk pariwisata dapat dibagi menjadi lima kategori yaitu menurut asal wisatawan, menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran, menurut jangka waktu, menurut jumlah wisatawan, dan menurut alat angkut yang digunakan.⁸ Bentuk-bentuk pariwisata tersebut dijelaskan di bawah ini:

1. Menurut asal wisatawan

Wisatawan itu berasal dari dalam atau luar negeri. Kalau asalnya dari dalam negeri berarti sang wisatawan hanya pindah tempat sementara di dalam lingkungan wilayah negerinya sendiri dan selama ia mengadakan perjalanan.

2. Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran

Kedatangan wisatawan dari luar negeri adalah membawa mata uang asing.

Pemasukan valuta asing ini berarti memberi dampak positif terhadap neraca

⁷ Marpaung, happy, *pengetahuan kepariwisataan*, Bandung, Alfabeta, 2000. Hlm. 32

⁸ Pendi Nyoman S. 2002. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm 37

pembayaran luar negeri suatu negara yang dikunjunginya, hal ini disebut pariwisata aktif. Sedangkan kepergian seorang warga negara ke luar negeri memberikan dampak negatif terhadap neraca pembayaran luar negerinya, disebut pariwisata pasif.

3. Menurut jangka waktu

Kedatangan seorang wisatawan di suatu tempat atau negara diperhitungkan pula menurut waktu lamanya ia tinggal di tempat atau negara yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan istilah-istilah pariwisata jangka pendek dan pariwisata jangka panjang, yang mana tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh suatu Negara untuk mengukur pendek atau panjangnya waktu yang dimaksudkan.

4. Menurut jumlah wisatawan

Perbedaan ini diperhitungkan atas jumlah wisatawan yang datang, apakah sang wisatawan datang sendiri atau rombongan. Maka timbulah istilah-istilah pariwisata tunggal dan pariwisata rombongan.

5. Menurut alat angkut yang dipergunakan

Dilihat dari segi penggunaan yang dipergunakan oleh sang wisatawan, maka kategori ini dapat dibagi menjadi pariwisata udara, pariwisata laut, pariwisata kereta api dan pariwisata mobil, tergantung apakah sang wisatawan tiba dengan pesawat udara, kapal laut, kereta api atau mobil.

3. Unsur-Unsur Dalam Pariwisata

Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri pariwisata adalah : travel agent atau tour operator, perusahaan pengangkutan, akomodasi perhotelan, bar dan restoran, travel agent local, *souvenirshoop*, perusahaan-perusahaan yang akan berkaitan dengan

aktivitas wisatawan seperti tempat menjual dan mencetak film, kamera, kartu pos, penukaran uang, bank dan lain-lain. Unsur-unsur dalam pariwisata terdiri dari⁹:

1. Politik pemerintahan, merupakan sikap pemerintah terhadap kepariwisataan yang ada. Politik pemerintahan dapat bersifat secara langsung, yaitu sikap pemerintah terhadap wisatawan yang datang ke daerah wisata dan tak langsung yaitu kondisi kestabilan politik, ekonomi, dan keamanan daerah bersangkutan.
2. Kesempatan berbelanja, tersedianya tempat belanja yang dibutuhkan wisatawan juga barang-barang khas tempat wisata.
3. Promosi, adalah propaganda kepariwisataan dengan didasarkan atas rencana atau propaganda secara teratur dan kontinu ke dalam negeri maupun ke luar negeri.
4. Harga, yaitu harga barang-barang, sarana dan prasarana yang ada. Pada intinya wisatawan sama seperti konsumen pada umumnya yang menginginkan harga murah dengan kualitas yang baik.
5. Pengangkutan, meliputi: keadaan jalan, alat angkut, dan kelancaran transportasi di tempat wisata
6. Akomodasi, merupakan rumah sementara bagi wisatawan. Hal yang penting diperhatikan dari akomodasi adalah: kenyamanan, pelayanan yang baik dan kebersihan sanitasinya.
7. Atraksi, adalah segala pertunjukan yang mempunyai nilai manfaat untuk dilihat atau diperhatikan termasuk objek wisata itu sendiri.
8. Jarak dan waktu, berkaitan dengan lamanya waktu yang harus dikorbankan wisatawan untuk mencapai tempat wisata. Semakin cepat mencapainya semakin baik.

⁹ *Ibid*

9. Sifat ramah tamah, wisatawan sangat menyenangi keramahan dari penduduk yang ada di tempat wisata tersebut.

Komponen atau unsur-unsur pariwisata meliputi¹⁰:

1. Atraksi,

Atraksi adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang ingin berkunjung ke suatu tempat daerah tujuan wisata. Atraksi meliputi benda yang tersedia di alam, hasil ciptaan manusia (kebudayaan) dan tata cara hidup dalam masyarakat. Adapun jenis-jenis atraksi wisata diantaranya:

- a. Benda-benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta, meliputi
 - 1) Iklim, misalnya cuaca cerah, banyak cahaya matahari, sejuk, kering, panas, hujan dan sebagainya
 - 2) Bentuk tanah dan pemandangan
 - 3) Hutan belukar misalnya hutan yang luas, banyak pohon-pohon
 - 4) Fauna dan flora, seperti tanaman-tanaman yang aneh, burung-burung, ikan, binatang buas, cagar alam, daerah perburuan dan sebagainya
- b. Pusat-pusat kesehatan dan termasuk dalam kelompok ini misalnya sumber air mineral, mandi lumpur, sumber air panas, dimana kesemuanya itu diharapkan dapat menyembuhkan macam-macam penyakit.
- c. Hasil ciptaan manusia, dibagi menjadi empat bagian penting yaitu benda-benda yang bersejarah dan kebudayaan dan keagamaan.
- d. Tata cara hidup masyarakat berupa tata cara hidup tradisional dari suatu masyarakat merupakan salah satu sumber yang amat penting untuk ditawarkan

¹⁰ Oka yoeti, 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, Jakarta : PT. Paramita

kepada wisatawan. Bagaimana kebiasaan hidupnya, adat istiadatnya semuanya merupakan daya tarik bagi wisatawan.

2. Aksesibilitas,

Aksesibilitas adalah kemudahan dalam mencapai daerah tujuan wisata baik secara jarak geografis atau kecepatan teknis serta tersedianya sarana transportasi ke tempat tujuan. Beberapa hal yang mempengaruhi aksesibilitas suatu tempat adalah kondisi jalan, tarif angkutan jenis kendaraan, jaringan transportasi, jarak tempuh dan waktu tempuh. Semakin baik aksesibilitas suatu obyek wisata wisatawan yang berkunjung dapat semakin banyak jumlahnya. Sebaliknya jika aksesibilitasnya kurang baik, wisatawan akan merasakan hambatan dalam kunjungan yang dilakukannya dalam berwisata.

3. Fasilitas

Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pengelola untuk kebutuhan wisatawan. Kebutuhan seperti prasarana perekonomian (pengangkutan, prasarana komunikasi, kelompok, sistem perbankan) dan prasarana sosial (sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, Faktor keamanan, dan pelayanan petugas).

Sarana prasarana sebagai berikut

- a. Prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam.

Pariwisata dapat berupa:

- 1) Prasarana umum, jalan, air bersih, terminal, lapangan udara, komunikasi dan listrik
 - 2) Prasarana yang menyangkut ketertiban dan keamanan agar terpenuhi dengan baik
- b. Sarana kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung atau tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung pada kedatangan wisatawan. Sarana dapat berupa:
- 1) Sarana pokok, perusahaan yang hidup dan kehidupannya tergantung pada kedatangan wisatawan, termasuk travel agen, transportasi, akomodasi dan restoran.
 - 2) Sarana pelengkap, perusahaan yang menyediakan fasilitas-fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok saja, tetapi agar wisatawan bias tinggal lebih lama
 - 3) Sarana penunjang, perusahaan yang menunjang sarana lengkap dan sarana pokok serta berfungsi agar wisatawan bias tinggal lebih lama dan lebih banyak mengeluarkan uangnya di obyek wisata.

Berdasarkan teori di atas unsur-unsur pariwisata dibagi tiga bagian dalam atraksi (benda yang tersedia di alam, hasil ciptaan manusia dan tata cara hidup dalam masyarakat), aksesibilitas (pengangkutan, akomodasi, jarak dan waktu,) dan fasilitas (politik pemerintahan, kesempatan berbelanja, promosi, harga, dan sifat ramah tamah).

4. Jenis Pariwisata

Pariwisata dapat dikelompokkan menurut objek yang menjadi daya tariknya, yaitu¹¹:

1. Pariwisata budaya, pariwisata yang didasari rasa ingin tahu wisatawan akan budaya lain, kebiasaan yang dilakukan, kepercayaan serta atraksi budaya lain.
2. Pariwisata kesehatan, adalah suatu kegiatan wisata yang dilakukan untuk penyegaran jasmani maupun rohani, seperti berkunjung ke tempat pemandian air panas.
3. Pariwisata olahraga, pariwisata yang dilakukan dalam rangka olahraga, seperti bepergian dalam rangka perwakilan negara dalam pertandingan olahraga antarnegara.
4. Pariwisata komersial, pariwisata yang dikomersilkan. Dapat berupa pameran-pameran
5. Pariwisata industri, erat kaitannya dengan pariwisata komersil, hanya saja objek yang dituju berupa lingkungan industri.
6. Pariwisata politik, pariwisata yang berkenaan dengan kegiatan politik suatu negara.
7. Pariwisata konvensi, pariwisata yang menyediakan fasilitas tempat pertemuanpertemuan atau acara antar negara.
8. Pariwisata sosial, adalah kegiatan wisata yang diperuntukkan bagi kelas menengah ke bawah. Kegiatan wisata ini biasanya disponsori oleh lembaga lembaga tertentu.
9. Pariwisata pertanian, adalah pariwisata yang memanfaatkan kegiatan pertanian (*agriculture*) dan produknya.
10. Pariwisata maritim, kegiatan wisata yang memanfaatkan pesona alam laut.
11. Pariwisata cagar alam, adalah kegiatan wisata dengan bepergian ke tempat cagar alam.
12. Pariwisata buru, adalah pariwisata yang menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan berburu.

¹¹ [Pendit Nyoman S. 2002. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar. Jakarta: Pradnya Paramita.](#)

13. Pariwisata bulan madu, pariwisata yang diperuntukkan bagi pasangan yang melakukan perjalanan bulan madu.

14. Pariwisata petualangan, adalah kegiatan berwisata ke tempat-tempat yang tidak lazim dikunjungi orang. Fasilitas yang ada sangat minim atau tidak ada. Semuanya sangat bersifat alami.

15. Pariwisata pilgrim, adalah pariwisata yang diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan.

Jenis pariwisata menurut bahwa pariwisata jenisnya bermacam-macam, masing-masing punya kekuatan dan kelemahan serta daya saingnya sendiri-sendiri. Jenis pariwisata itu antara lain wisata alam (panorama), wisata belanja, wisata sejarah, wisata budaya, wisata olah raga (*surfing, mountainering, bungy jumping, gantole*, olah raga air/sky dan air/layar, jetski dan lain-lain), wisata fauna (kebun binatang, taman safari, taman reptil dan taman burung), agro wisata dan atau gabungan diantara dua atau lebih dari jenis wisata tersebut¹².

Jenis pariwisata dibagi menjadi enam yaitu¹³ :

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (Pleasure Tourism)

Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk melihat sesuatu yang, untuk menikmati keindahan alam, dan lain-lain.

2. Pariwisata untuk rekreasi

¹² Pemayun, C.I.A. 2010. Format Kerjasama Pengelolaan Daya Tarik Wisata antara Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan Desa Pakraman. *Jurnal Analisis Pariwisata*, Vol.10, No.1, Th. 2010. Hal 9.

¹³ J James Spillane. 1991. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Kanisius. Yogyakarta. Hal 28-31

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat untuk memulihkan kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan dan kelelahannya.

3. Pariwisata untuk kebudayaan (*Cultur Tourism*)

Jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat-istiadat, cara hidup rakyat, dan lain-lain.

4. Pariwisata untuk olah raga (*Sport Tourism*), dibagi menjadi:

- a. *Big sport events*, yaitu peristiwa-peristiwa olah raga besar seperti olimpiade game, kejuaraan tinju dunia, dan lain-lain.
- b. *Sporting tourism of the practitioners*, yaitu pariwisata olah raga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempratikan sendiri, seperti pendakian gunung, rafting, berburu, dan lain-lain.

5. Pariwisata untuk urusan usaha dagang (*Business Tourism*)

Jenis pariwisata ini seperti industri pariwisata, tetapi juga mencakup semua kunjungan ke pameran, kunjungan ke instalasi teknis yang bahkan menarik orang-orang luar profesi ini.

6. Pariwisata untuk berkonvensi (*Convention Tourism*)

Peranan jenis wisata ini makin lama makin penting. Konfensi dan pertemuan bentuk ini sering dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan peserta yang biasanya tinggal di beberapa kota atau negara penyelengg

Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa jenis-jenis pariwisata meliputi pariwisata budaya, kesehatan, olahraga, komersial, industry, politik, konvensi, social, pertanian, maritime, cagar alam, buru, bulan madu, pengetahuan dan pilgrim.

5. Wisatawan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 wisatawan merupakan orang yang melakukan kegiatan wisata. Mengenali tipologi wisatawan merupakan hal penting dalam membuka paket wisata yang menjadi daya tarik suatu industri pariwisata. Klasifikasi wisatawan menurut Cohen sebagai berikut¹⁴ :

1. Drifter, yaitu wisatawan yang ingin mengunjungi daerah yang sama sekali belum diketahuinya dan bepergian dalam jumlah kecil.
2. Eksplorer, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan dengan mengatur perjalanannya sendiri dan tidak mau mengikuti jalan-jalan wisata yang sudah umum melainkan mencari hal yang tidak umum (Off the beaten track). Wisatawan seperti ini bersedia memanfaatkan fasilitas dengan standar lokal dan tingkat interaksi dengan masyarakat lokal juga tinggi.
3. Individual Mass Tourist, yaitu wisatawan yang hanya menyerahkan pengaturan perjalanannya kepada agen perjalanan dan mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah terkenal.
4. Organized-Mass Tourist, yaitu wisatawan yang hanya mau mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah dikenal, dengan fasilitas seperti yang dapat ditemuinya di tempat

¹⁴ Muljadi A.J, 2009, *kepariwisataan dan perjalanan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 25

tinggalnya dan perjalanannya selalu dipandu oleh pemandu wisata. Wisatawan seperti ini terkungkung oleh apa yang disebut sebagai environmental bubble.¹⁵

5. Wisatawan Mancanegara Definisi wisatawan ini ditetapkan berdasarkan rekomendasi International Union of Office Travel Organization (IUOTO) dan World Tourism Organization (WTO). Wisatawan mancanegara adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan ke sebuah atau beberapa negara di luar tempat tinggal biasanya atau keluar dari lingkungan tempat tinggalnya untuk periode kurang dari 12 bulan dan memiliki tujuan untuk melakukan berbagai aktivitas wisata. Terminologi ini mencakup penumpang kapal pesiar (*cruise ship passenger*) yang datang dari negara lain dan kembali dengan catatan bermalam. Kondisi pariwisata alam yang sedang mengalami pertumbuhan memiliki beberapa keterbatasan dalam sarana dan prasarana, namun terdapat kelebihan dalam keaslian atau objek wisata yang alami. Hal ini berpeluang untuk menarik wisatawan bertipe petualang dan menyukai perjalanan ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi oleh orang lain.

Smith juga melakukan klasifikasi wisatawan, dengan membedakan wisatawan atas tujuh kelompok, yaitu :

1. Explorer

Yaitu wisatawan yang mencari perjalanan baru dan berinteraksi secara intensif dengan masyarakat lokal, dan bersedia menerima fasilitas seadanya, serta menghargai norma-norma dan nilai-nilai lokal.

2. Elite

¹⁵ *Ibid.* hlm 34

Yaitu wisatawan yang mengunjungi daerah tujuan wisata yang belum dikenal, tetapi dengan pengaturan lebih dulu, dan bepergian dalam jumlah yang kecil

3. Off-beat

Yaitu wisatawan yang mencari atraksi sendiri, tidak mau ikut ke tempat-tempat yang sudah ramai dikunjungi. Biasanya wisatawan seperti ini siap menerima fasilitas seadanya di tempat lokal.

4. Unusual

Yaitu wisatawan yang dalam perjalanannya sekali waktu juga mengambil aktivitas tambahan, untuk mengunjungi tempat-tempat yang baru, atau melakukan aktivitas yang agak beresiko. Meskipun dalam aktivitas tambahannya bersedia menerima fasilitas apa adanya, tetapi program pokoknya tetap harus mendapatkan fasilitas yang standar.

5. Incipient Mass

Yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan secara individual atau kelompok kecil, dan mencari daerah tujuan wisata yang mempunyai fasilitas standar tetapi masih menawarkan keaslian (authenticity)

6. Mass;

Yaitu wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata dengan fasilitas yang sama seperti didaerahnya, atau bepergian ke daerah tujuan wisata dengan environment bubble (nuansa lingkungan) yang sama. Interaksi dengan masyarakat lokal kecil, kecuali dengan mereka yang langsung berhubungan dengan usaha pariwisata

7. Charter

Yaitu wisatawan yang mengunjungi daerah tujuan wisata dengan lingkungan yang mirip dengan daerah asalnya, dan biasanya hanya untuk bersantai/bersenang-senang. Mereka bepergian dalam kelompok besar, dan meminta fasilitas yang berstandar internasional.

Berdasarkan teori di disimpulkan bahwa wisatawan merupakan orang yang melakukan kunjungan atau perjalanan wisata. Batasan tentang wisatawan sangat bervariasi mulai dari yang umum sampai dengan yang sangat teknis spesifik. Klasifikasi wisatawan meliputi drifter, ekspolrer, individual mass touris, dan organized mass tourist.

6. Motivasi Wisatawan

motivasi sebagai suatu dorongan yang timbul dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak melakukan sesuatu tanpa disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu hingga mencapai hasil atau tujuan tertentu.¹⁶ Motivasi merupakan dorongan terhadap serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan, yang mengandung elemen meliputi unsur membangkitkan, mengarahkan, menunjukkan intensitas, bersifat terus menerus dan adanya tujuan.¹⁷

Motivasi perjalanan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal wisatawan itu sendiri, berdasarkan kebutuhan atau keinginan manusia itu sendiri dan faktor eksternal wisatawan yang sama terbentuk dari pengaruh faktor-faktor eksternal seperti: norma susila, pengaruh, atau tekanan keluarga, situasi kerja dan sebagainya.¹⁸ Pada dasarnya seseorang melakukan perjalanan dimotivasi oleh beberapa hal yang mendorong mereka untuk

¹⁶ Sardiman, A.M. 2012. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹⁷ Wibowo. 2012. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 379

¹⁸ Pitana, I Gededan Putu G. Gayatri, 2005, *Sosiologi Pariwisata*, Jakarta: Paramita Pradnya

memutuskan berwisata di suatu tempat tertentu. Mcintosh dan Murphy mengelompokkan motivasi wisatawan ke dalam empat kelompok, yaitu¹⁹:

- a. *Physical or physiological motivation* (motivasi yang bersifat fisik atau fisiologis), antara lain untuk relaksasi, kesehatan, kenyamanan, berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, bersantai dan sebagainya.
- b. *Cultural motivation* (motivasi budaya), yaitu keinginan untuk mengetahui budaya, adat, tradisi, dan kesenian daerah lain. Termasuk juga kelestarian akan berbagai objek peninggalan kebudayaan (monumen sejarah)
- c. *Social motivation* atau *interpersonal motivation* (motivasi yang bersifat sosial) seperti mengunjungi teman dan keluarga, menemui mitra kerja, melakukan hal-hal yang dianggap mendatangkan gengsi, melakukan ziarah, dan pelarian dari situasi yang membosankan.
- d. *Fantasy motivation* (motivasi karena fantasi), yaitu adanya fantasi bahwa di daerah lain seseorang akan bisa lepas dari rutinitas keseharian yang menjemukan, dan ego-enhancement yang memberikan kepuasan psikologis. Disebut juga sebagai status and prestige motivation.

Berdasarkan teori di disimpulkan bahwa motivasi wisatawan merupakan dorongan dari dalam diri seorang wisatawan untuk melakukan perjalanan menuju daerah wisata berdasarkan kebutuhan dan keinginan orang tersebut. Motivasi karyawan dibagi menjadi empat kelompok yaitu motivasi yang bersifat fisik, motivasi bersifat budaya, motivasi bersifat social dan motivasi karena fantasi.

7. Pemasaran Pariwisata

¹⁹ Okta A, Yoeti, 2001, *Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata*. Jakarta, Paramitha Pradnya, hlm. 46

Krippendorff memberikan batasan pemasaran wisata sebagai berikut, penyesuaian yang sistematis dan terkoordinasi mengenai kebijakan dari badan-badan usaha wisata maupun kebijakan dalam sector pariwisata pada tingkat pemerintah, lokal, regional, nasional, dan internasional, guna mencapai suatu titik kepuasan optimal bagi kebutuhan-kebutuhan kelompok pelanggan tertentu yang telah diterapkan sebelumnya, sekaligus untuk mencapai tingkat keuntungan yang memadai.²⁰

Pemasaran pariwisata (*tourism marketing*) adalah suatu sistem dan koordinasi yang dilaksanakan sebagai suatu kebijakan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kepariwisataan, baik milik swasta maupun pemerintah, dalam ruang lingkup lokal, regional, nasional, dan internasional untuk dapat mencapai kepuasan wisatawan dengan memperoleh keuntungan yang wajar.²¹

Pada dasarnya pemasaran pariwisata adalah usaha yang dilakukan untuk menarik wisatawan lebih banyak datang, lebih lama tinggal dan lebih banyak membelanjakan uangnya di suatu tujuan wisata. Kegiatan-kegiatan seperti itulah yang dirumuskan oleh ahli ekonomi sebagai pemasaran. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran pariwisata merupakan keseluruhan aktivitas yang diarahkan untuk memberikan informasi kepada konsumen yang bertujuan untuk memuaskan keinginan wisatawan sebagai konsumen. Pemasaran pariwisata (*tourism marketing*) sangat kompleks sifatnya karena produk yang ingin dipasarkan sangat terikat dengan supplier yang menghasilkannya, instansi, organisasi, atau lembaga pariwisata yang mengelolanya. Memasarkan produk industri pariwisata tidak hanya sebatas koordinasi, tetapi diperlukan kerjasama yang baik

²⁰ Wahab, Saleh. 1992. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Pradya Paramitha.

²¹ **Op.cit. hlm 55.**

antara organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan pariwisata dengan semua pihak yang terlibat dan berkaitan dengan kegiatan pariwisata.

Keberhasilan suatu program pemasaran dalam bidang pemasaran sangat ditentukan oleh faktor kesamaan pandangan terhadap peranan pariwisata bagi pembangunan daerah, karena itu sebelum program pemasaran dilaksanakan harus ada komitmen dari semua unsur terkait bahwa pariwisata merupakan sektor ekonomi yang bersifat *quick yielding* dan merupakan *agent of development* bagi daerah berkaitan. Bertolak pada industri pariwisata merupakan industri yang berorientasi pada jasa layanan dan mempunyai sifat yang sangat berlawanan dengan industri barang, sangat subjektif, serta intangible maka dengan karakteristik yang dimilikinya tersebut dalam pemasarannya harus memperhatikan strategi pemasaran dalam artian proses segmenting, targetting, positioning, dan marketing mix harus tepat.²²

Berdasarkan teori di atas disimpulkan bahwa sebuah organisasi pariwisata perlu melakukan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Pemasaran pariwisata merupakan serangkaian kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola melalui koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tingkat keuntungan yang memadai.

B. Dinas Pariwisata

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman

a. Dasar Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman

Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Sleman No. 94 Tahun 2016 tentang perubahan pertama Atas Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman merupakan unsur

²² *Ibid*

pelaksanaan Pemerintah Daerah dibidang kepariwisataan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab penuh kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.²³

b. Tugas Pokok dan Peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman

Tugas pokok dan peranan keberadaan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman sesuai dengan SK Bupati Sleman Tanggal 2 Desember 2016 No. 11 Tahun 2016.

- a. Melaksanakan kewenangan bidang kebudayaan dan pariwisata.
- b. Melaksanakan fungsinya sebagai:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata.
 - 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata.
 - 3) Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas.
 - 4) Memberikan izin untuk segala usaha yang berada di kawasan obyek wisata Kaliurang.

c. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman

- a. Kepala Dinas;
- b. Secretariat terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:
 - 1) Seksi Fasilitas Pariwisata; dan
 - 2) Seksi Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata terdiri dari:

²³ Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata

- 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; dan
 - 2) Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata
- e. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari:
- 1) Seksi Analisa Pasar, Dokumentasi dan Informasi Pariwisata; dan
 - 2) Seksi Promosi Pariwisata
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Uraian Tugas Pokok dan Peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman
- a. Kepala Dinas, sebagai Pimpinan atau Kepala Kantor.
 - b. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Bagian sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
 - 2) Subagian keuangan, perencanaan dan evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan tugas mengembangkan fasilitas obyek daya tarik wisata, atraksi wisata dan ekonomi kreatif. Bidang pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif terdiri dari:
 - 1) Seksi Fasilitas Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan fasilitas obyek daya tarik wisata.

- 2) Seksi atraksi wisata dan ekonomi kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan atraksi wisata dan ekonomi kreatif.
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata melaksanakan tugas membina dan mengembangkan sumber daya manusia dan usaha pariwisata. Bidang pengembangan sumber daya manusia dan usaha pariwisata terdiri dari:
- 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan mempunyai fungsi menyiapkan bahan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan kepariwisataan.
 - 2) Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan usaha pariwisata.
- e. Bidang Pemasaran Pariwisata melaksanakan tugas pemasaran pariwisata. Bidang pemasaran pariwisata terdiri dari:
- 1) Seksi Analisa Pasar, Dokumentasi dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan analisa pasar dan mengelola dokumentasi dan informasi.
 - 2) Seksi Promosi Pariwisata melaksanakan tugas mengembangkan promosi pariwisata.
- f. Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas Pariwisata.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian. Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

2. Pengelolaan Obyek Wisata

Pengelolaan suatu kawasan atau lingkungan yang dinilai indah atau mempunyai arti sejarah untuk menjadikan suatu tempat pariwisata mempunyai suatu dampak lingkungan, dampak tersebut bisa negatif maupun positif. Dalam pengelolaan area wisata pengelolaan ini lebih mendekati merusak lingkungan, merusak dan mempengaruhi kebudayaan dan struktur kemasyarakatan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi lingkungan yang terbaik dan mungkin untuk menjamin hubungan antara kegiatan pariwisata dan lingkungan harus diperhatikan selami mungkin. Karena dalam kasus bidang pariwisata sangatlah erat hubungannya dengan lingkungan.

Kemudian muncul Undang-undang No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan diadakan untuk semakin mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek dan daya tarik wisata.

Beberapa tempat menunjukkan banyaknya peningkatan yang tajam, terutama pariwisata domestik. Pada hari minggu dan hari libur lainnya banyak tempat pariwisata yang dikunjungi wisatawan dalam negeri. Oleh karena itu agar pengelolaan, pengembangan, peningkatan pariwisata dapat berjalan dengan baik, kemudian pemerintah melakukan pembinaan terhadap kegiatan kepariwisataan tersebut dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan.

Kebijaksanaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah serta pengembangan yang begitu pesat dibidang kepariwisataan yang perlu diikuti dengan pengaturan yang sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia. Pengaturan dibidang kepariwisataan ini perlu dibuat Undang-undang yang bersifat nasional dan menyeluruh sebagai dasar hukum

dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan kepariwisataan, khususnya menyangkut obyek dan daya tarik wisata, usaha pariwisata, peran serta masyarakat serta pembinaanya.

Usaha-usaha kepariwisataan tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan, karena dalam pembangunan pariwisata itu hendaknya tidak terjadi pembangunan yang menyangkut obyek wisata dan daya tarik wisata, usaha pariwisata, keadaan masyarakat tidak sesuai dengan keadaan lingkungan tetapi hendaknya pembangunan pariwisata itu dilakukan dengan memperhatikan keadaan lingkungan, agar tercapai keseimbangan dan keserasian antara pembangunan pariwisata dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Kegiatan kepariwisataan tersebut tidak hanya mengacu kepada orang yang melakukan kegiatan wisata tetapi juga meliputi obyek dan daya tarik wisata dan usaha-usaha dibidang tersebut.

1. Obyek dan daya tarik ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yaitu obyek dan daya tarik wisata yang memang sudah ada sebelumnya, bukan karya manusia seperti keadaan alam, flora dan fauna.
2. Obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia, yaitu obyek dan daya tarik wisata yang memang dibuat oleh manusia, seperti museum, peninggalan sejarah, wisata agro, seni budaya, taman rekreasi, tempat hiburan dan lain sebagainya.

Obyek dan daya tarik wisata ini kemudian diusahakan, dikelola dan dibuatnya obyek-obyek baru sebagai obyek dan daya tarik wisata sehingga dapat menciptakan suatu kawasan pariwisata. Tetapi dalam membuat obyek wisata dan daya tarik wisata harus diperhatikan juga keadaan sosial ekonomi setempat, sosial budaya daerah setempat, nilai-nilai agama, adat-istiadat, lingkungan hidup, serta obyek daya tarik wisata itu sendiri.

Pengertian pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat dijumpai dalam bab I ketentuan umum, Pasal I butir 3 UUPH 1997, yaitu “Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”. Maksud pengertian pembangunan yang berwawasan lingkungan bahwa penggunaan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana berarti senantiasa memperhitungkan dampak kegiatan pembangunan pariwisata tersebut baik terhadap pembangunan yang berkesinambungan. Kesadaran manusia sangatlah diperlukan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam guna meningkatkan mutu kehidupan rakyat. Karena sumber-sumber daya alam itu meskipun tidak terbatas baik dalam jumlah maupun kualitasnya akan tetapi kebutuhan akan sumber daya alam tersebut juga semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan yang ada. Sejalan dengan itu pula daya dukung lingkungan dapat terganggu dan kualitas lingkungan hidup dapat menurun.

Berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 1990 Bab II Pasal 3 tentang kepariwisataan, penyelenggaraan kepariwisataan itu bertujuan:

1. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek wisata dan daya tarik wisata.
2. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa.
3. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan rakyat.

5. Mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Pembangunan pariwisata bukan ditujukan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara maksimal, tetapi ditujukan untuk keuntungan jangka panjang bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Untuk mencapai pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan tidaklah mudah, tetapi dibutuhkan pengertian dan kemauan untuk dapat menciptakan keseimbangan antara berbagai faktor dalam lingkungan yang menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pembangunan pariwisata memerlukan dukungan kebijaksanaan pariwisata yang tepat, yang mampu menjadi pijakan dan panduan bagi tindakan strategi di masa mendatang. Hal ini penting bagi pembangunan wisata yang berkelanjutan.

Disamping masyarakat sekitar obyek wisata, lingkungan alam sekitar obyek wisata perlu diperhatikan dengan seksama agar tidak rusak dan tercemar. Lalu lalang manusia yang terus meningkat dari hari-kehari dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem dari fauna dan flora disekitar obyek wisata. Oleh karena itu perlu upaya menjaga pelestarian lingkungan melalui penegakan berbagai aturan dan persyaratan dalam pengelolaan obyek wisata. Pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal.

Pembinaan pelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari pembangunan nasional, pembangunan dan pengembangan ini bagian dari pembangunan masyarakat. Oleh karena itu penyertaan seluruh rakyat untuk ikut melestarikan, memelihara dan mengembangkan lingkungan yang jelas dan terpadu ialah bahwa arah dan tujuan

kebijaksanaan tersebut mudah diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat dan masyarakat sendiri memperoleh manfaat dari kebijaksanaan tersebut.

Kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang menyangkut aspek pembangunan, perusahaan dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah serta perkembangan yang begitu pesat di bidang kepariwisataan perlu diikuti dengan pengaturan sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia begitu juga, pengelolaan kawasan pariwisata yang banyak dibangun diberbagai wilayah perlu mendapatkan pengamanan agar tidak terjadi ketimpangan terhadap masyarakat disekitarnya, tetapi dapat mewujudkan adanya keserasian dan keseimbangan.

Kepariwisataan menurut Undang-undang No. 9 tahun 1990 Pasal I butir 4 adalah “segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata”. Artinya semua kegiatan yang ada kaitannya dengan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan pariwisata baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Menurut Pasal I ayat (2) UU No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, yang berbunyi: “Wawasan ialah orang yang melakukan kegiatan wisata”. Menurut pengertian ini, semua orang yang melakukan perjalanan wisata dinamakan wisatawan. Apapun tujuannya, yang penting perjalanan itu bukan untuk menetap dan tidak untuk mencari nafkah di tempat berkunjung.

Menurut Prof. Marioti atraksi wisata segala sesuatu yang terdapt di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang dan berkunjung di suatu tempat di daerah tujuan wisata, diantaranya:

1. Benda-benda yang tersedia di alam semesta, termasuk kelompok ini adalah
 - a. Iklim di daerah tujuan wisata

- b. Bentuk tanah dan pemandangan seperti, pegunungan dan air terjun
 - c. Hutan belukar, seperti hutan yang luas banyak pohon
 - d. Fauna dan flora, seperti tanaman-tanaman aneh dan binatang langka
 - e. Pusat-pusat kesehatan, seperti sumber air panas yang dapat menyembuhkan macam-macam penyakit.
2. Hasil ciptaan manusia, termasuk kelompok ini adalah Benda-benda yang bersejarah, kebudayaan dan keagamaan, seperti museum, rumah adat, festival kesenian rakyat setempat.
3. Tata cara hidup masyarakat setempat. Tata cara hidup tradisional dari suatu masyarakat merupakan salah satu sumber yang amat penting untuk ditawarkan kepada para wisatawan, adalah:
- a. Kebiasaan hidup
 - b. Adat istiadatnya

Obyek dan daya tarik wisata ini kemudian diusahakan, dikelola dan dibuatnya obyek-obyek baru sebagai obyek dan daya tarik wisata sehingga dapat menciptakan suatu kawasan wisata.

Mengenai kedudukannya yang sangat menentukan itu maka daya tarik wisata harus dirancang, dibangun dan kelola secara professional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang. Membangun obyek wisata harus diperhatikan juga keadaan sosial ekonomi, sosial budaya, nilai-nilai agama, adat istiadat dan lingkungan hidup masyarakat sekitar kawasan wisata. Umumnya daya tarik wisata berdasar pada : Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih, ialah:

- a. Adanya ciri khusus yang bersifat langka

- b. Adanya sarana atau prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir.
- c. Obyek wisata alam yang mempunyai daya tarik tersendiri karena keindahan alam pegunungan, pantai dan sebagainya.
- d. Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tersendiri karena ada nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian dan upacara adat.

Untuk rangka pengembangan suatu daerah tujuan wisata, macam apa pariwisata yang hendak dikembangkan banyak tergantung dari warisan alam yang dimiliki atau peningkalan nenek moyangnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan tertentu untuk menerima wisatawan, yaitu yang disebut dengan daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan pariwisata dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu:

a. Tujuan Wisata

Adalah untuk mendapatkan rekreasi, yaitu tujuan rekreasi tidak hanya bersenang-senang saja, dengan rekreasi orang ingin memulihkan kekuatan dirinya baik fisik maupun spriritual. Karena itu tujuan rekreasi bermacam-macam antara lain bermain, olah raga, belajar dan beristirahat. Walaupun tujuan bermacam-macam tetapi semuanya mempunyai sifat umum yang sama yaitu dilakukan diluar pekerjaan untuk mendapat hiburan. Harapan itu menciptakan suatu kondisi psikologis tertentu pada wisatawan. Karena daya dukung lingkungan berkaitan dengan faktor psikologi, misalnya wisatawan yang ingin istirahat dengan mencari keheningan di daerah pegunungan akan merasal kesal jika tempat itu banyak orang, bising dengan suara

kendaraan bermotor. Dengan demikian daya dukung pariwisata berbeda menurut tujuan wisata itu.

Perencanaan pengembangan pariwisata haruslah memperhatikan daya dukung berdasarkan atas tujuan pariwisata, di Indonesia pada umumnya tujuan rekreasi masih kurang mendapat perhatian. Rekreasi banyak diartikan sebagai bermain-main saja, sehingga disarankan agar tujuan masing-masing tempat wisata itu diidentifikasi dan diadakan pengembangan yang diatur sesuai dengan tujuannya.

b. Faktor Lingkungan Biofisik Lokasi pariwisata

Faktor ini mempengaruhi kuat rapuhnya suatu ekosistem sangat menentukan besar kecilnya daya dukung tempat pariwisata tersebut. Ekosistem yang kuat mempunyai daya dukung lingkungan yang tinggi yaitu degan menerima wisatawan dalam jumlah besar. Agar tidak mudah rusak ekosistem ini umumnya terdapat pada ketinggian di atas laut yang rendah, dalam atau landai.

Faktor biofisik yang mempengaruhi daya duku lingkungan bukan hanya faktor alamiah, melainkan juga faktor buatan manusia, misalnya adanya perkampungan penduduk di dekat lokasi pariwisata yang limbahnya terbuang langsung ke lokasi wisata, sehingga ini akan menurunkan daya dukung lingkungan pariwisata. Sarana pariwisata juga merupakan faktor daya dukung, karena seperti jalan dan tempat istirahat sangat penting.

Daya dukung lingkungan tidak hanya dilihat dari sarana pelayanan wisatawan tetapi juga harus dari segi kemampuan lingkungan untuk mendatangkan sarana itu seperti, terlalu banyak di bangun tempat peristirahatan menyebabkan makin berkurang luas hutan. Jelaslah jika perencanaan pariwisata tidak memperhatikan daya

dukung lingkungan akan menurunkan kualitas lingkungan dan rusaknya ekosistem yang dipakai untuk pariwisata itu.

3. Sumber Hukum Pariwisata

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan meliputi, antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standardisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

Beberapa tempat wisata menunjukkan banyaknya peningkatan yang tajam, terutama pariwisata domestik. Pada hari minggu dan hari libur lainnya banyak tempat pariwisata yang dikunjungi wisatawan dalam negeri. Oleh karena itu agar pengelolaan, pengembangan, peningkatan pariwisata dapat berjalan dengan baik, kemudian pemerintah melakukan pembinaan terhadap kegiatan kepariwisataan tersebut dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan.

Kemudian muncul Undang-undang No. 9 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang berfungsi untuk memenuhi jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan,

mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Sesuai dengan Undang-undang No. 9 tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 18 bahwa pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pada pasal 19 menyebutkan bahwa setiap orang atau masyarakat di sekitar destinasi pariwisata berhak untuk berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan dan berhak untuk menjadi pengelola destinasi wisata.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Oleh karena itu penting bagi pembangunan obyek wisata untuk mendapat ijin mendirikan/mengelola destinasi wisata bagi kepada pemerintah maupun pemerintah daerah.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pariwisata.

Pemerintah Daerah dalam upaya menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman, menyelenggarakan tanda daftar usaha pariwisata. Tanda daftar usaha pariwisata merupakan pengganti dari izin kepariwisataan yang sebelumnya diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten. Izin kepariwisataan tersebut diatur dalam peraturan daerah yang didasarkan pada

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, meliputi Usaha Pondok Wisata, Usaha Rekreasi Hiburan Umum, Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati, Usaha Rumah Makan, Usaha Perkemahan Wisata, Usaha Penginapan Remaja, Usaha Kawasan Wisata, Mandala Wisata, Usaha Restoran, Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Izin Pramuwisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata menimbang bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat perlu dilakukan daftar usaha pariwisata.²⁴ Berdasarkan Pasal 2 Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 bahwa setiap pengusaha yang melakukan kegiatan, memiliki, dan/atau mengelola usaha pariwisata wajib memiliki TDUP dan TDUP diterbitkan setelah terpenuhinya tahapan pemberian izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Pemerintah Daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan atas rekreasi, pariwisata, dan olahraga menyediakan pelayanan berupa penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang berada di Kabupaten Sleman. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan perlu adanya upaya-upaya untuk menjaga dan melestarikan tempat rekreasi dan olahraga serta menciptakan rasa aman, tertib, dan nyaman baik bagi masyarakat dan wisatawan, pengelola dan penyelenggara usaha tempat rekreasi dan olahraga, maupun lingkungan sekitarnya. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan agar tempat rekreasi dan olahraga

²⁴ [Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pariwisata](#)

yang ada dapat didayagunakan seoptimal mungkin sehingga mendatangkan manfaat bagi Pemerintah Daerah, masyarakat sekitarnya, maupun wisatawan.²⁵

Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan penyediaan pelayanan pada tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tersebut membutuhkan peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan yang diperolehnya. Besaran retribusi disesuaikan dengan kemampuan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keadilan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyediaan pelayanan pada tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan yang menjadi objek retribusi jasa usaha.

²⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.